

**OPTIMALISASI PENERTIBAN IZIN PENDIRIAN BANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

ARTIKEL HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Radityo Aryo S

NIM. 0910111042



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2013

ABTRAKSI

RADITYO ARYO S, 0910111042. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013. *Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi*, Dr.Shinta Hadiyantina, SH., M.H., Agus Yulianto, SH., M.H.

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaandalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul . Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah sebagai aparat yang mempunyai wewenang dalam menertibkan pelanggaran pendirian izin menara telekomunikasi, hampir setiap hari menertibkan tower yang terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu melakukan penelitian langsung ke Instansi-instansi yang bersangkutan dengan masalah menara telekomunikasi terutama di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mencari dan menggali data. Data diperoleh dari lapangan berupa wawancara dan dokumentasi hukum, serta data kepustakaan, maka penulis selanjutnya menganalisa data tersebut secara deskriptif analitis yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam optimalisasi upaya penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo adalah: (1) Pembentukan tim untuk mengorganisasi pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo; (2) Menerapkan sanksi administratif tegas terhadap pelanggaran pemasangan tower di Kabupaten Sidoarjo; dan (3) Upaya represif dengan secara berkala memeriksa dan membongkar tower yang telah melanggar ketentuan pemasangan tower. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah dalam optimalisasi upaya penertiban izin pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal berupa kurangnya tenaga operasional, pihak Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo berupaya menambah tenaga dengan memanfaatkan bantuan dari Instansi lain yang memiliki kelebihan tenaga untuk membantu pelaksanaan penertiban izin pendirian tower. Sedang untuk mengatasi hambatan eksternal, pihak Dinas Perijinan dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi terhadap pentingnya ketertiban pemasangan tower.

Kata Kunci : optimalisasi, penertiban izin

ABSTRACT

Aryo Radityo S, 0910111042. Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, June 2013. Optimization of Control Tower Building Permits Cellular Telecommunications Establishment According Sidoarjo Regency Regulation No. 23 Tahun2007 About Implementation of Telecommunication Tower, Dr.Shinta Hadiyantina, SH., MH, Agus Yulianto, SH., MH

To meet most requirements in obtaining a college degree in legal science writer writing thesis with the title. Optimization of Control Tower Building Permits Cellular Telecommunications Establishment According Sidoarjo Regency Regulation No. 23 Tahun2007 About Implementation of Telecommunication Towers. This is motivated by the many violations of the installation of telecom towers in the district of Sidoarjo. Government as officials who have the authority to regulate telecommunications tower permit the establishment of violations, almost every day tower-mounted curb and not in accordance with the requirements as set forth in Bylaw No. 23 of 2007 on the Implementation of Telecommunication Towers.

In this study, the type of research is the juridical sociological research to agencies directly concerned with the issue of telecommunication towers, especially in the Integrated Licensing Service Agency to seek and explore the data. Data obtained from the field in the form of interviews and legal documentation, as well as literature data, the authors further analyzed the data by analytic descriptive data that has been processed will be analyzed and described in such a way as to obtain a conclusion.

From the results, it can be concluded that the optimization efforts of the Government of Sidoarjo district policing efforts in the optimization of new building permits telecommunications tower in Sidoarjo is: (1) The establishment of a team to organize the establishment tower in Sidoarjo, (2) Implement administrative sanctions decisively against installation of tower offense in Sidoarjo, and (3) repressive efforts by periodically inspect and dismantle tower that has violated the provisions of tower installation. Barriers experienced by the Government in the optimization permits the establishment of such efforts in Sidoarjo regency tower consists of internal barriers and external barriers. Efforts are being made to overcome internal barriers such as lack of operational personnel, the District of the District Licensing Agency to seek to increase power by utilizing the help of other agencies that have excess energy to assist the implementation of the demolition permit establishment tower. Moderate to overcome external obstacles, the Department of Licensing with the assistance of the Government of Sidoarjo regency order to disseminate the importance of tower installation.

Keywords: optimization, demolition permits

A. Pendahuluan

Perkembangan jaman merupakan suatu konsekuensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri¹. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya. Indonesia sebagai Negara berkembang tentu tidak lepas dari pembangunan. Pembangunan yang tengah kita laksanakan saat ini, banyak di tunjang oleh penggunaan teknologi telekomunikasi. Karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sebagai pemersatu bangsa, serta meningkatkan hubungan antara bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa dan Negara akan terasa lamban, yang artinya, kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Ditengah era informasi dewasa ini, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat. Salah satu penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi telekomunikasi.

Semakin banyaknya bangunan tower yang bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap

¹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991. hlm 45

pemasangan tower tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang juga harus segera diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Penegakan hukum dalam upaya penertiban beredarnya bangunan tower yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penegakkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian tugas dari Pemerintah.

Pendirian tower apabila dihubungkan dengan pengertian bangunan yang dimaksudkan dengan Perda Nomer 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Bahwa tower tersebut merupakan kriteria bangunan yang harus memperoleh izin dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Perda nomer 23 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi² :

- a) Persebaran Menara Telekomunikasai dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.

Kenyataan yang ada saat ini bahwa tempat pendirian Tower-tower pengantar sinyal tersebut tidak mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata

² Pasal 12 Peraturan Daerah Sidoarjo No 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

bangunan, estetika dan keamanan lingkungan. Contoh seperti pendirian bangunan Tower di Lingkar Timur, Desa Rangkakidul dan pendirian bangunan tower Perumahan Bluru permai, bahwa lokasi tersebut diperuntukan untuk perumahan rakyat tetapi di daerah tersebut juga didirikan bangunan tower. Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi mengingat akibat yang akan timbul terhadap masyarakat dalam radius tertentu, apabila terjadi kejatuhan atau keruntuhan tiang tower tersebut sangat fatal bahayanya terhadap masyarakat sekitarnya, dan selain bahaya tersebut dimana masyarakat yang mempunyai tanah yang batas sepadan dengan bangunan tower tidak berani untuk mendirikan bangunan diatas tanah mereka.

berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI PENERTIBAN IZIN PENDIRIAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NO.23 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana optimalisasi penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemberlakuan sistem optimalisasi penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo, serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian langsung ke Instansi-instansi yang bersangkutan dengan masalah menara telekomunikasi terutama di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mencari dan menggali data tentang Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Dinas Perijinan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Cipta Karya dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jenis Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui wawancara yang telah dipilih oleh peneliti serta catatan-catatan hasil pengamatan secara langsung peneliti sendiri³.

Jenis Data Sekunder, yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal ilmiah yang pada umumnya tentang pengaturan pendirian tower telekomunikasi, dan laporan-laporan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban menara telekomunikasi.

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit.Jakarta 2004. hlm. 57

Data yang bersifat primer yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden dan instansi.

Data yang bersifat data sekunder Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta hasil-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.tersebut yang dimaksudkan untuk menambah keterangan yang belum lengkap.

Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini meliputi seluruh instansi yang berkaitan tentang penertiban tower menara telekomunikasi. Dalam pengambilan sample, penulis menggunakan metode purposive sampling.

Teknik analisis data Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa yang dikaitkan dengan dengan teori Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi optimalisasi, penertiban, izin, menara telekomunikasi, peraturan daerah, pemerintah.

D. Pembahasan

Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Tower Kabupaten Sidoarjo

Dinas perijinan mempunyai agenda rutin untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam hal pemasangan Tower yang dilakukan setiap kurang lebih dua kali seminggu. Adapun dalam kegiatan rutin tersebut pihak Dinas Perijinan akan dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Tim sebagaimana dimaksud adalah Dinas Perhubungan dan Dinas PU Cipta Karya dan petugas dari Satpol PP. Dalam hal ini Dinas Perijinan berperan sebagai penyedia data mengenai siapa saja yang telah melakukan pelanggaran, baik karena tidak memiliki ijin ataupun yang melanggar ketentuan surat ijin pemasangan Tower⁴¹.

Dari hasil penelitian penulis, bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemasangan Tower yang terjadi pada Kabupaten Sidoarjo antarlain adalah:

1. Tidak memiliki Surat Ijin Pemasangan Tower

Seringkali terjadi pemasangan tower dilakukan tanpa melalui proses perijinan, jadi tanpa mendapatkan ijin pemasangan Tower. Di dalam pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo No.23 tahun 2007 tentang ketentuan perizinan ditetapkan bahwa pemasangan tower hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati.

2. Tidak Sesuai Cell Planing

Tidak jarang terjadi pemasang melakukan pemasangan tower di tempat selain lokasi yang disebutkan dalam surat ijin pemasangan tower.

⁴¹Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 Mei 2013

Diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemrosesan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut⁵, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasang Tower antara lain adalah dengan cara memasang Tower di tempat lain. Ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perbedaan biaya dan kemudahan ijin untuk beberapa lokasi tertentu. Namun ketika ijin turun, mereka tidak memasang tower di lokasi tersebut, melainkan di tempat lain.

3. Tidak Memperbarui Izin Tower Setelah Habis Waktunya

Tidak memperbarui izinnya setelah habis waktunya merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari pemasang tower. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemrosesan Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut⁶ bahwa sering terjadi hal dimana tower tetap terpasang setelah habis batas waktu pemasangannya. Ironisnya, keadaan ini seakan tidak diperhatikan oleh pemasang atau dengan kata lain pemasang seakan enggan untuk melepas towernya. Hal ini tentu akan merugikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri.

4. Klarifikasi Kontruksi Tower

Sering kali terjadi ketidak sesuaian terhadap pemasangan kontruksi tower merupakan suatu bentuk pelanggaran dari pemasang tower. Di dalam pasal 9 Perda Kabupaten Sidoarjo No.3 Tahun 2012 tentang Penyediaan Pembangunan Menara Telekomunikasi bahwa Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memenuhi standar baku

⁵Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 4 Mei 2013

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 Mei 2013

tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi.

5. Melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Ijin Pemasangan Tower

Meskipun proses perijinan telah dilakukan atau pemasang telah mendapatkan ijin pemasangan tower, tetapi pemasang melanggar ketentuan dan kewajiban yang terdapat dalam Surat Keputusan Pemasangan tower.

6. Tidak membayar pajak Tower

Pada dasarnya kewajiban untuk membayar pajak tower merupakan proses terakhir untuk mendapatkan surat Ijin Pemasangan tower yang kemudian diatur dalam ketentuan surat ijin. Sehingga bagi pemasang yang tidak membayar pajak tower atau melalaikan pajak tower dapat berarti bahwa ia telah melanggar ketentuan perijinan dan ketentuan surat ijin pemasangan tower.

Untuk upaya optimalisasi penertiban izin pendirian Tower di Kabupaten Sidoarjo, maka pihak Dinas Perijinan dan dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Tim sebagaimana dimaksud adalah Dinas Perhubungan dan Dinas PU Cipta Karya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembentukan tim untuk mengorganisasi pemasangan tower di Kabupaten Sidoarjo
2. Menerapkan sanksi administratif tegas terhadap pelanggaran pemasangan tower di Kabupaten Sidoarjo
3. Upaya represif dengan secara berkala memeriksa dan membongkar tower yang telah melanggar ketentuan pemasangan tower.

Hambatan dalam Optimalisasi Penertiban Pendirian Izin Tower di Kabupaten Sidoarjo

1. Faktor Penghambat Internal

Faktor Penghambat Internal lebih banyak disebabkan karena minimnya tenaga operasional yang mengerti betul pelaksanaan operasi penertiban dan juga minimnya dana untuk keperluan tersebut. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka kendala tersebut menjadi sangat berarti karena dengan minimnya petugas operasional akan banyak lokasi atau tempat pemasangan tower yang terlewatkan pengawasannya. Kendala internal lainnya adalah kurangnya dana operasional. Mengingat luasnya daerah operasi penertiban, maka dalam pelaksanaan operasi penertiban dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

2. Faktor Penghambat Eksternal

Merupakan faktor penghambat yang disebabkan dari masyarakat, khususnya pemasang atau penanggungjawab tower. Masyarakat

terkadang menghambat pelaksanaan penertiban, dimana mereka mendapatkan kompensasi dari pemasang tower sehingga pada saat dilaksanakan penertiban tower, masyarakat seringkali menghalang-halangi.

Solusi dalam Mengatasi Hambatan Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Tower di Kabupaten Sidoarjo

1. Solusi terhadap Faktor Hambatan Internal

Untuk mencari solusi dari adanya factor penghambat akibat kurangnya tenaga operasional, Dinas Perijinan mempunyai rencana untuk mengambil beberapa tenaga operasional dari bagian-bagian di instansi tersebut, yang sekiranya tidak membutuhkan banyak tenaga untuk dijadikan petugas operasional lapangan. dengan meminta bantuan instansi lain yang kelebihan personel. Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo juga bisa meminta bantuan dari Instansi tertentu untuk bekerjasama melakukan tindak pengawasan terhadap pelanggaran tower pada daerah yang sulit terjangkau dari pusat Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.

2. Solusi terhadap Faktor Hambatan Eksternal

Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat, terutama untuk mengatasi sikap masyarakat yang kerap kali menentang upaya penertiban, pihak Dinas Perijinan berupaya melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundangan mengenai pemasangan tower di masyarakat.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya optimalisasi penertiban izin pendirian tower yang dilakukan Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo adalah: (1) Pembentukan tim untuk mengorganisasi pemasangan tower di Kabupaten Sidoarjo; (2) Menerapkan sanksi administrative tegas terhadap pelanggaran pemasangan tower di Kabupaten Sidoarjo; dan (3) Upaya represif dengan secara berkala memeriksa dan membongkar tower yang telah melanggar ketentuan pemasangan tower. Hambatan internal adalah sebagai berikut: (1) Minimnya tenaga operasional; dan (2) Minimnya dana operasional. Sedangkan hambatan eksternal adalah sebagai berikut: (1) hambatan dari masyarakat; dan (2) Perusahaan tidak menghiraukan peringatan. Terdapat upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal yang dihadapi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan internal adalah berupaya menambah tenaga dengan memanfaatkan bantuan dari Instansi lain yang memiliki kelebihan tenaga untuk membantu pelaksanaan penertiban tower. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal, pihak Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan tindakan: (1) sosialisasi terhadap pentingnya ketertiban pemasangan tower; (2) meningkatkan kinerja dengan mengupayakan komputerisasi di

Kantor Dinas Perijinan sehingga dengan adanya database di Dinas Perijinan

B. Saran

1. Ijin penyelenggaraan tower merupakan salah satu instrument pengendalian pemanfaatan lokasi pemasangan tower. Dalam mekanisme ijin penyelenggaraan tower, penyelenggara pemegang ijin penyelenggaraan tower hendaknya selalu menjalankan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan normatif di dalam substansi ijin penyelenggaraan tower yang di dasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada, agar nantinya akan tercipta keteraturan dan ketertiban hukum, khususnya dalam mechanism ijin penyelenggaraan tower guna mendukung kelancaran dalam usaha dan menghindar iterjadinya suatu hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perijinan, sehingga nantinya proses perijinan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan penertiban tower berjalan efektif dan efisien.
2. Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, selaku yang berwenang membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan agar selalu konsisten dan obyektif di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menjalan prosedur yang jelas dan efisien, serta tepat guna untuk optimalisasi fungsi dan wewenangnya, serta bersikap tegas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran

guna mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam mekanisme ijin penyelenggaraan tower

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit. Jakarta 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan menara telekomunikasi

C. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo